ANALISIS PENGARUH HUKUM ANSURANSI DALAM MASYARAKAT

Faisal Bartolmeus Zalukhu¹, Fiktor Zega², Ahmad Ansyari Siregar³
faisalzalukhu23@gmail.com¹, anamnias22@gmail.com², ansyarisiregar@gmail.com³
Universitas Labuhan Batu

ABSTRAK

Asuransi merupakan alat investasi untuk menghadapi bahaya di masa depan, maka keberadaan asuransi menjadi salah satu pilihan investasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengetahuan dan minat akan nilai asuransi tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap asuransi dan bagaimana pengaruh asuransi itu sendiri. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Tingkat pengetahuan, diikuti dengan kualitas produk, merupakan elemen terpenting yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mengambil keputusan asuransi menurut penelitian ini, tetapi tidak ada hal lain yang diketahui. Akibatnya, perusahaan asuransi harus benar-benar membuat masyarakat agar yakin terhadap hukum asuransi.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pengaruh Asuransi dalam masyarakat.

ABSTRACT

Decisions according to this study, but nothing else is known. As a result, insurance companies must really makes people believe in insurance law. Insurance is an investment tool to face future dangers, So the existence of insurance becomes one of the people's investment choices. Community involvement in knowledge and interest in the value of insurance is not can be separated from the success of insurance companies. This research aims to identify and study the elements that influence public interest on insurance and how insurance itself influences. Qualitative analysis is used as a research method. Level knowledge, followed by product quality, are the most important elements influence people's interest in making insurance.

Keywords: Knowledge, Influence of Insurance in society.

PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak atau lebih di mana penanggung setuju untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas setiap kerugian, kerusakan, atau penggunaan lain yang sesuai yang disebabkan oleh tanggung jawab pihak ketiga sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti yang terjadi, atau penanggung setuju untuk memberikan pembiayaan berdasarkan jaminan, kematian, atau kehidupan penanggung. Asuransi adalah kontrak di mana penanggung setuju untuk mengganti tertanggung atas kerugian penting, kerusakan, atau kehilangan keuntungan sebagai akibat dari insiden yang tidak terduga dengan imbalan pembayaran premi. Mushtafa Ahmad Zarqa mengklaim bahwa Asuransi adalah cara atau metode untuk melindungi manusia dalam menghindari risiko (ancaman) dari berbagai bahaya yang akan terjadi dalam kehidupan mereka atau dalam kegiatan ekonomi mereka. Metodologi dan deskripsi asuransi dalam hal kejadian dapat berbeda-beda, tetapi asuransi adalah cara atau metode untuk melindungi manusia dalam menghindari risiko (ancaman) dari berbagai bahaya yang akan terjadi dalam kehidupan mereka atau dalam kegiatan ekonomi mereka. Ia mengklaim bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadhmun yang berusaha untuk menutupi kejadian atau musibah bagi sekelompok orang yang terkena musibah. Premi mereka digunakan untuk membayar penggantian.

Prinsip utama asuransi.

Asuransi atau Ta'min adalah upaya untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui kumpulan entitas dalam bentuk aset atau tabarru memberikan model pemulihan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul di masyarakat melalui ketaatan pada hukum asuransi

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada sesuatu dan hal ini disertai dengan keinginan untuk memahami, mengamati dan membuktikan lebih lanjut. dan akan menciptakan pengaruh dari hukum asuransi itu sendiri Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umum Tentang pengaruh hukum asuransi. Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk memutuskan menggunakan produk asuransi adalah tingkat suku bunga. Minat merupakan salah satu faktor spiritual yang membantu dan memotivasi individu

untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal bahasa, minat adalah kecondongan tinggi terhadap sesuatu, hasrat, keinginan.

Singkatnya, minat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam dan melakukan sesuatu, suatu kegiatan atau situasi yang memberikan objek yang menarik perasaan dengan gembira. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk menikmati (mendekati/memiliki/melekat) pada objek agar dapat memusatkan perhatian pada objek tersebut merupakan daya tarik objek. Minat adalah perasaan suka dan keterikatan pada sesuatu atau aktivitas yang belum dibicarakan. Pada dasarnya, yang menjadi perhatian klien saat membeli suatu produk adalah pengetahuan tentang produk asuransi. Pengetahuan klien tentang asuransi sangat penting untuk memicu minat menjadi klien. Informasi klien dapat dipahami sebagai tingkat wawasan atau pemahaman klien terhadap fitur layanan tertentu.

Bagi konsumen, product knowledge merupakan faktor penentu agar konsumen dapat menggunakan produk dalam jangka waktu yang lama, yang menciptakan kemampuan dan loyalitas untuk menggunakan produk asuransi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pengetahuan konsumen akan kebutuhan asuransinya sendiri, manfaat asuransi syariah dan berbagai bentuk produk asuransi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi asuransi

Dalam hukum Asuransi, kita mengenal bermacam-macam istilah. Ada yang mempergunakan istilah hukum Pertanggungan, hukum Asuransi. Dalam bahasa Belanda disebut Verzekering Recht, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut Insurance Law. Sedangkan dalam praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Assuransi (Assurantie)',

Bagi yang memakai istilah Verzekering, maka perusahaan Asuransi sebagai pihak yang menanggung (Penanggung) disebut dengan istilah Verzekeraar, dan orang yang ditanggung dikatakan Verzekeerde. Sedangkan dalam istilah Inggris Insurance, pihak penanggung disebut "the insurer", dan pihak yang ditanggung (Tertanggung) disebut dengan istilah "the insured". Tetapi kalau kita perhatikan ketentuan dalam Marine Insurance Act tahun 1906, bagi tertanggung dipakai istilah "the assured", sedang untuk penanggung "the insurer" mengingat istilah penjamin dan terjamin tersebut dapat mengacaulan dengan lembaga "jaminan" yang dikenal dalam hukum perdata. Sepem diketahui dalam hukum perdata kita mengenal apa yang disebut "borgtoech" sebagai suatu lembaga jaminan perorangan Seperti dikatakan di atas bahwa dalam hukum Belanda istilah hukum asuransi disebut verzekering recht, tetapi ada juga yang menyebut assurantie recht. Sarjana Wichers

dalam bukunya yang berjudul *De rechtsleer der levensverzekerings overeenkomst*, menyatakan bahwa istilah asuransi hanyalah meliputi asuransi kerugian (*schade verzekering*) Memang istilah asuransi barangkali lebih populer dan lebih memasyarakat kalau dibandingkan dengan istilah pertanggungan 21 Dengan menyebutkan asuransi orang sudah mengerti apa maksudnya, sedangkan istilah pertanggungan masih diperlukan penjelasan lebih lanjut. Apalagi dalam hukum pertanahan (hukum agraria) dikenal istilah tanggungan (hak tanggungan/jaminan). Demikian pula dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 yang mulai berlaku pada tanggal 10 April 1996 mempergunakan istilah Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Dasar Hukum Asuransi

Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* dijumpai suatu pengertian atau definisi resmi dari asuransi. Pasal tersebut menyatakan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dari definisi ini dapat kita ambil beberapa unsur yang penting yaitu :

Unsur pertama: adanya suatu persetujuan atau perjanjian antara penanggung dengan tertanggung;

Unsur kedua : dalam perjanjian tersebut terdapat unsur pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;

Unsur ketiga : untuk mengalihkan resiko itu tertanggung membayar premi;

Unsur keempat : kalau terjadi suatu peristiwa yang semula belum pasti terjadi, penanggung membayar sejumlah uang atau ganti ruginya.

Apabila kita perhatikan bunyi pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, maka perjanjian asuransi ini masuk dalam perjanjian untung-untungan (*kans-overeenkomst*). Menurut pasal itu selain perjanjian asuransi yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan, juga adalah bunga cagak hidup (*lijfrente*) dan perjudian dan pertaruhan (*spel en weddenschap*). Hanya saja pengaturan yang memasukkan asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan rasanya kurang tepat. Sebab dalam perjanjian untung-untungan pihak-pihak secara sadar dan sengaja menjalani suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang . Sedangkan dalam asuransi hal itu tidak ada. Walaupun demikian ada juga sarjana yang menyatakan bahwa pengaturan demikian sudah tepat . Hal ini disebabkan pembayaran uang asuransi selalu digantungkan kepada "peristiwa yang tidak pasti" (*onzekker voorval*). Dengan terjadinya *onzekker voorval* itu maka dibayar uang asuransi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, memberikan definisi yang lebih lengkap tentang asuransi jika dibandingkan dengan pasal 246 KUHD. Dalam pasal 1 (1) disebutkan : Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Hukum asuransi (*verzekering recht*) pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) buku I titel 9 dan 10, dan buku II titel 9 dan 10 yang pengaturannya sebagai berikut :

Buku I titel 9 : mengatur tentang Asuransi pada umumnya.

Buku I titel 10 : mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang Mengancam hasil pertanian di sawah dan tentang ansuransi jiwa.

Buku I titel 10 ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

- bagian pertama : mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran;
- bagian kedua : mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah.
- bagian ketiga : mengatur asuransi jiwa. sur yang lebih

Buku II titel 9: mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.

Buku II titel 9 ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- bagian pertama : mengatur tentang bentuk dan isi asuransi;
- bagian kedua : mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang diasuransikan;
- bagian ketiga : Mengatur tentang awal dan akhir bahaya;
- bagian keempat : mengatur tentang hak dan kewajiban-kewajiban penanggung dan tertanggung;
- bagian kelima : mengatur tentang Abandonnemen; mengatur tentang kewajiban
- bagia keenam : mengatur tentang hak dan kewajiban- kewajiban dan hak mekelar di dalam asuransi laut.

Buku II titel 10 : mengatur tentang asuransi terhadap bahaya- bahaya pengangkutan di darat di Darat dan sugai-sungai serta perairan di pendalalaman

Buku I titel 10 dan Buku Ii titel 10 pengaturannya bersifat secara ringkas saja, tidak seperti yang diatur dalam Buku I titel 9 dan Buka 11 titel 9 yang pengaturannya agak luas.

Di dalam praktek perasuransian masih kita jumpai peraturan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperi misalnya antara lain:

1. Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang yang diatur dalam Us. dang-Undang No. 33 tahun 1964.
2. Asuransi atas Kecelakaan Lalu Lintas yang diatur dalam Undang- Undang No. 34 tahun 1964.
3. Asuransi Kredit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 33 tahun 1964.
5. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 34 tahun 1964.
6. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.
7. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.
8. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PN. Taspen).
9. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
10. Surat Keputusan Presiden No. 230 tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (Askes) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beserta keluarganya.

Kita mengetahui bahwa dalam garis besarnya menurut pembahagian klasik ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) dan asuransi ganti

kerugian (schade verzekering). Tetapi dengan perkembangan usaha perasuransian muncul satu jenis asuransi lagi yaitu asuransi varia (varia verzekering).

Dikatakan asuransi sejumlah uang karena besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung. Berbeda halnya dengan asuransi kerugian, disini ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan. Dengan perkataan lain besarnya ganti rugi yang diberikan penanggung sangat erat hubungannya dengan kerugian yang diderita tertanggung. Sedangkan asuransi varia yang juga disebut asuransi campuran karena merupakan campuran (kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi ganti kerugian. Timbulnya ganti rugi yang akan dibayar oleh penanggung

Tidak lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian tetapi sata ditentukan besarnya jumlah uang Menunit Prof Emmy P Simanjuntak cara untuk mengetahui "dengan mudah apakah suatu pertanggungan (asuransi) mu sergulang pada Pertanggungan Kerugian atau Pertanggungan Sejumlah Uang tergantung pada jawahan dari pertanyaan terhadap prestasi apua penanggung itu mengikatkan dirinya" Apabila penanggung mengikatkan dinnya untuk melakukan prestasi memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya maka disitulah terdapat Pertanggungan Sejumlah Llang, apabila mengikatkan dirinya untuk melakukan pertan dalam bentuk mengganti rugi sepanjang ada kerugian timbul maka kita menghadapi Pertanggungan Kenagian. Selanjutnya dikatakannya. Di dalam Pertanggungan Sejumlah Uang, pemberian sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya itu bergantung pada peristiwa yang padi umumnya (kecuali pertanggungan Jiwa) tidak pasti akan terjadi, yang ada hubungannya dengan "hidup" atau "jiwa" seseorang mau "kesehatan dari seseorang Jadi Pertanggungan Sejumian Uang tu menyangkut din pribadi manusia itu sendiri. Prof. Emmy menyamakan Sommen Verzekering dengan Persoons Verzekering oleh karens Persoons Verzekering itu adalah pertanggungan atas hidup atau jiwa seseorang pertanggungan jiwa), mengenai kesehatan seseorang (misalnya pertanggungan biaya sakit) dan pertanggungan invaliditas seseorang.

KUHD yang disahkan pada tahun 1838 dalam pasal 247 merinci asuransi dalam lima jenis yaitu:

1. Asuransi kebakaran;
2. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah;
3. Asuransi jjiwa;
4. Asuransi di lautan dan perbudakan;
5. Asuransi pengangkutan darat dan di sungai-sungai serta perairan-prairan pedalaman.

3. Pengaruh Hukum Asuransi Dalam Masyarakat

Di dalam hukum asuransi adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan dikembalikan kepada tertanggung. Jika kita meninjau dari sudut ini maka asuransi dapat kita bedakan:

1. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali kalau terjadi premi restorno.
2. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur menabung. Jadi walaupun tidak terjadi onzekker voorval (peristiwa yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi), penanggung dalam jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah.

Perjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya ka jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi ji dwi guna, tri guna, dan sebagainya.

Apabila kita melihat Undang-Undang Usaha Perasuransian yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka dapat dijumpai bentuk, bentuk asuransi dan usaha perasuransian. Inti dari UU No. 2 Tahun 1992 adalah:

- a. Usaha Perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi yang terdiri dari:
- Usaha asuransi kerugian
 - Usaha asuransi jiwa,
 - Usaha reasuransi, dan

Bidang usaha penunjang usaha asuransi yang terdiri dari:

- Usaha pialang asuransi,
- Usaha pialang reasuransi;
- Usaha penilai kerugian asuransi;
- Usaha konsultan aktuarial;
- Usaha agen asuransi.

Program asuransi sosial yang kepesertaannya bersifat wajib hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.

b. Adanya azas sukarela untuk masuk asuransi dan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.

c. Bentuk hukum usaha perasuransian adalah:

- Perusahaan Perseroan (Persero);
- Koperasi;
- Perseroan Terbatas (PT);
- Usaha Bersama (Mutual).

Perusahaan perorangan (one man business) tidak boleh mengusahakan asuransi kecuali hanya untuk konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi. Sedangkan kepemilikan dapat berbentuk BUMN,

Swasta nasional dan usaha patungan (joint venture). Izin usaha perasuransian diberikan oleh Menteri Keuangan.

Perusahaan asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, demikian pula perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungulangan.

Undang-undang ini juga memberi pengertian-pengertian autentik (resmi) antara lain tentang:

- Asuransi atau pertanggungulangan,
- Obyek asuransi,
- Program asuransi sosial;
- Perusahaan perasuransian;
- Perusahaan asuransi kerugian;
- Perusahaan asuransi jiwa, dan sebagainya.

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal itu juga dan diumumkan dalam Lembaran Negara R.1. No. 13.

Menurut Walter Woon type utama kategori Asuransi ada empat jenis yaitu:

1. Marine Insurance (asuransi laut)
2. Life Insurance (asuransi jiwa)
3. Fire Insurance (asuransi kebakaran)

4. Accident Insurance (asuransi kecelakaan).

KESIMPULAN

Jadi, kesimpulan dari jurnal yang di tulis oleh penulis adalah pengertian asuransi itu sendiri sangat lah penting bagi masyarakat yang dimana asuransansi adalah perjanjian kontrarak antara kedua belak pihak yang mengakibatkan Hukum. seperti Dalam Pasal 264 KUHD (atau kitab Hukum dagang) yang menyatakan bahwa asuransi itu persetujuan antara tertanggung dan penanggu,dan penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dan dalam asuransi ini merupakan perjanjian ini saling untung-untungan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.ABDUL MUIS,SH,M.S/MEDAN 1996/ hukum asuransi dan bentuk-bentuk perasuransian, Hal.1
H.ABDUL MUIS,SH,M.S/MEDAN 1996/ hukum asuransi dan bentuk-bentuk perasuransian, Hal.4
H.ABDUL MUIS,SH,M.S/MEDAN 1996/ hukum asuransi dan bentuk-bentuk perasuransian, Hal.11
H.ABDUL MUIS,SH,M.S/MEDAN 1996/ hukum asuransi dan bentuk-bentuk perasuransian, Hal.21